

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Hasil penelitian terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Sitta yang mengambil judul tentang “Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan)”. Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan dukungan dari pemerintah kota Surabaya serta dampak dari pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan di lima sekolah menengah dan kejuruan yang ada di Surabaya, dengan sumber data dinas pendidikan kota Surabaya, pengamat pendidikan, kepala sekolah dan guru di sekolah menengah dan kejuruan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang dukungan pemerintah kota Surabaya dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Surabaya dan mengkaji dampak dukungan pemerintah kota Surabaya berupa program kebijakan yang dijalankan di tingkat sekolah. Ruang lingkup pengkajian dibatasi pada lingkup pendidikan menengah dan kejuruan di Kota Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dukungan pemerintah pada pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Surabaya dengan pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) mulai pendidikan dasar hingga pendidikan menengah negeri dan Hibah BOPDA pada sekolah swasta; 2) Pelaksanaan

program BOPDA berdampak positif pada peningkatan akses pendidikan untuk masyarakat kota Surabaya dan berdampak adanya kuota bagi masyarakat luar kota Surabaya; 3) Dampak BOPDA pada pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah menengah dan kejuruan berpengaruh pada manajemen pelaksanaan ditingkat sekolah, antara lain: kebijakan sekolah dalam hal pembiayaan, kondisi sarana dan prasarana pembelajaran, partisipasi siswa dalam pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta partisipasi Orangtua.

Pelaksanaan program BOPDA memang memberikan dampak positif pada peningkatan akses pendidikan untuk masyarakat kota Surabaya. Bantuan ini memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat Surabaya, khususnya bagi mereka yang menengah kebawah dalam memperoleh pendidikan gratis di Surabaya.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki persamaan meneliti tentang bantuan pendidikan bagi pelajar pada suatu kota tertentu. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada tempat penelitian dan objek penelitiannya. Tempat penelitian terdahulu ada pada kota Surabaya sedangkan penelitian sekarang berada di Kabupaten Bojonegoro, dan objek penelitiannya pun berbeda jika pada penelitian terdahulu objek penelitian adalah mengenai pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun yang mendapatkan bantuan dari Biaya Operasional Pendidikan Daerah. Objek penelitian yang sekarang adalah program Gerakan Ayo

sekolah yang merupakan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurul dkk yang mengambil judul tentang “Profil Wajib Belajar 9 tahun dan Alternatif Penuntasannya”. Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan mengenai kesenjangan di daerah Kediri kota dan Kabupaten. Kediri yang pemerintahannya terdiri atas kota dan Kabupaten terdapat kesenjangan yang mencolok dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun. Di daerah kota (pemerintah kota), Kediri dapat dikatakan sudah dapat menuntaskan wajib belajar 9 tahun (Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2007). Namun tidak demikian halnya di daerah pedesaan (wilayah pemerintah Kabupaten) yang belum terjadi penuntasan wajib belajar 9 tahun (Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, 2008). Penelitian ini akan dilakukan selama dua tahun di Kabupaten Kediri. Pada tahun pertama digunakan pendekatan kuantitatif untuk melakukan survei serta pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis dokumen, pengamatan, wawancara dan fokus groups discussion (FGD).

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Kediri, yang dirinci sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui gambaran umum (profil) pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, yang meliputi: data pokok wajib belajar, pemerataan wajib belajar, mutu wajib belajar, efisiensi internal wajib belajar, sebaran APK dan APM wajib belajar di setiap Kecamatan. Kedua, mengetahui profil wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Banyakan dan Pare. Ketiga, mengetahui peta masalah wajib belajar 9 tahun, yang meliputi faktor geografis-demografis, ekonomi, sosial-budaya, dan kelembagaan

sekolah. Keempat, mengetahui potensi sumber daya penunjang penuntasan wajib belajar 9 tahun, yang meliputi: (1) kegiatan dan jam efektif belajar siswa, serta muatan lokal, (2) partisipasi masyarakat, (3) sumber daya alam dan sumber daya sosial. Kelima, mengetahui kebutuhan dan alternative untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Keenam, mengembangkan prototype model pendidikan dasar untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun. Ketujuh, menguji keefektifan model yang disusun; dan mengimplementasikan serta sosialisasi model yang dihasilkan

Hasil penelitian adalah: (1) profil wajib belajar 9 tahun dapat terlihat dari sisi kependudukan, pembangunan pendidikan, data pokok, pemerataan, mutu, efisiensi, dan sebaran APK tiap kecamatan; (2) profil ketidak tuntasan wajib belajar terlihat dari rendahnya APK, jumlah sekolah, siswa, lulusan dan putus sekolah; (3) peta masalah ketidaktuntasan bersumber dari rendahnya ekonomi orang tua, geografis-demografis, dan Sosial-budaya orang tua, (4) potensi sumber daya yang perlu diperhatikan dalam penuntasan wajib belajar adalah sumber daya alam dan sosial; (5) kebutuhan yang harus dipenuhi dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun adalah alternatif model pendidikan yang dikembangkan berdasarkan analisis masalah dan potensi yang ada.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki persamaan meneliti tentang program pendidikan wajib belajar dan anti putus sekolah. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada tempat penelitian terdahulu

pada Kabupaten Kediri dan penelitian sekarang pada Kabupaten Bojonegoro. Penelitian terdahulu dan sekarang juga memiliki perbedaan pada objek penelitian terdahulu meneliti tentang kesenjangan pendidikan wajib belajar 9 tahun antara di kota dan Kabupaten sedangkan penelitian sekarang meneliti implementasi dari kebijakan program ayo sekolah dari Dana Alokasi Khusus APBN.

## **B. Kebijakan Publik Dalam Sektor Pendidikan**

Sebelum membicarakan mengenai kebijakan publik, sangat perlu memahami dahulu konsep kebijakan. Hal ini perlu dilakukan karena begitu luasnya penggunaan konsep dan istilah kebijakan, sehingga akan menimbulkan sudut pandang yang berbeda dalam memahami konsep kebijakan dan kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan. Terdapat perbedaan definisi tentang konsep kebijakan publik (*public policy*) dengan kebijakan privat (*private policy*). Kebijakan publik biasanya dibuat oleh pemerintah dan memberikan dampak yang besar dan luas pada publik (masyarakat), misalnya kebijakan Sisdiknas dan UAN. Sedangkan kebijakan privat biasanya dibuat oleh badan perseorangan atau swasta, namun bisa juga kebijakan tersebut membawa dampak dan mengikat pada publik (masyarakat), misalnya kebijakan yang berupa iklan dari perusahaan di media televisi yang memberikan dampak yang besar bagi publik. Beragam definisi tentang konsep kebijakan publik dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua pendapat yang mengemuka. *Pertama*, pendapat yang memandang bahwa kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Pendapat ini cenderung beranggapan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah pada dasarnya dapat disebut sebagai kebijakan publik. *Kedua*, pendapat yang memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan (*policy implementation*). Pandangan yang pertama melihat bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu, dan pandangan yang kedua beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat atau dampak yang dapat diramalkan atau diantisipasi sebelumnya. Peters (1980) membagi tingkat kebijakan dengan menggolongkan berdasarkan pengaruhnya terhadap perubahan yang ditimbulkan pada kehidupan masyarakat. Pada tingkat pertama adalah keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh DPR, Presiden dan berbagai kelompok penekan (*pressure groups*), yang hasilnya berupa kebijakan untuk dilakukan (*policy in action*). Pada tingkat kedua adalah *output* kebijakan, yang mana pemerintah melaksanakan hasil-hasil kebijakan dengan membelanjakan uang dan membuat peraturan pelaksanaan yang akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pada tahap ketiga adalah *policy impact* (akibat-akibat kebijakan) yang ditimbulkan oleh berbagai pilihan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada dasarnya aspek kebijakan publik sangat kompleks. Pertama, dalam pelaksanaannya yang menyangkut pada strukturnya. Struktur yang ada dalam sistem pemerintahan seringkali menimbulkan konflik dalam implementasi kebijakan karena adanya perbedaan kepentingan pada masing-masing jenjang pemerintahan. Kedua, bahwa tidak semua kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah sendiri, seringkali kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh organisasi swasta dan individu. Ketiga, bahwa kebijakan yang diambil pemerintah akan selalu

menimbulkan akibat terhadap kehidupan warga negara. Dengan kata lain kebijakan publik merupakan suatu proses yang amat kompleks, bersifat analitis dan politis yang tidak mempunyai awal atau akhir dan batas-batas dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti. Kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang disebut pembuatan kebijakan itu menghasilkan suatu akibat yang dinamakan kebijakan (Lindbolm, 1986).

Mengkaitkan studi kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan dengan manajemen pendidikan akan selalu berbicara tentang manajemen pendidikan secara makro. Manajemen pendidikan dapat dikatakan sebagai kegiatan penataan aspek pendidikan, termasuk dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang tercakup dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, seperti yang dilakukan dalam kegiatan manajemen pendidikan di level nasional (makro) maupun level regional (meso). Aspek pendidikan yang merupakan kajian manajemen pendidikan merupakan *public goods* bukan *private goods*. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan barang dan jasa milik umum (publik), yang mana masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran (pasal 31 UUD 1945), dan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, utamanya peranan mendasar menyediakan kesempatan belajar. Oleh karena pendidikan merupakan *public goods*, maka sudah semestinya kajian kebijakan pendidikan masuk dalam perspektif kebijakan publik dalam dimensi kajian manajemen pendidikan yang multidisipliner.

Dalam aplikasi yang terbatas dan selektif, perspektif kebijakan pendidikan secara kuantitatif dapat meningkatkan derajat rasionalitas dalam proses

pembuatan keputusan di sektor publik (termasuk kebijakan pendidikan). Pendekatan dalam analisis *analycentric* lebih ditujukan pada dekomposisi masalah sosial makro strategis menjadi beberapa masalah yang lebih operasional. Sebagai contoh, *masalah mutu pendidikan* dapat didekomposisikan menjadi beberapa komponen masalah yang berkaitan secara langsung atau tidak, seperti mutu guru, mutu siswa, mutu pengelolaan, mutu proses pendidikan, mutu sarana prasarana, mutu proses pengajaran. Selanjutnya dilakukan analisis kebijakan terhadap masing-masing komponen secara tuntas sehingga menghasilkan beberapa alternatif kebijakan yang masing-masing diperkirakan mempunyai akibat yang komplementer terhadap pemecahan masalah makro mutu pendidikan tersebut, dan setiap akibat yang ditimbulkan masing-masing bagian harus terorganisasi dalam kesatuan konsep. Dalam analisis efisiensi pendidikan baik internal maupun eksternal, pendekatan *analycentric* menganggap bahwa pendidikan dapat dianalogikan sebagai suatu industri, yang mana output pendidikan merupakan fungsi dari berbagai faktor input pendidikan. Sumbangan masing-masing input terhadap output pendidikan dapat diukur secara tepat sehingga dimungkinkan untuk dilakukan simulasi yang mampu menghasilkan kesimpulan, seberapa besar suatu input pendidikan dapat ditingkatkan / ditekan agar menghasilkan suatu tingkat output yang diinginkan. Namun demikian, perspektif tersebut sangat kental pengaruh model-model ekonomi yang mengutamakan aspek rasionalitas dan pendekatan kuantitatif – dari teori ekonomi (*neo-classical economic theory*), ekonomi mikro (*micro economics*), ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*), dan teori kuantitatif dalam pengambilan keputusan (*quantitative decision theory*) –



sehingga masalah kebijakan pendidikan yang sangat kompleks dan beragam cenderung direduksi dan dipandang hanya sekedar persoalan teknis semata yaitu bagaimana mengalokasikan sumberdaya ekonomi (*the economic models of resources*) secara tepat diantara sejumlah alternatif. Dalam kompleksitas kebijakan pendidikan, sungguh sulit mengaplikasikan bagaimana mengalokasikan sumberdaya politik (*political resources*) – status, legitimasi, kewenangan, kekuasaan, kepentingan – secara tepat. Dalam kasus lain, sesungguhnya sangat sulit untuk merumuskan realitas masalah sosial politik dalam ukuran kuantitatif. Demikian pula dengan sejumlah isu dan masalah politik problematik yang dihadapi akan cenderung disederhanakan untuk menyesuaikan diri pada keinginan analisis dan metode kuantitatif yang dipakai, sehingga mengakibatkan hal mendasar menyangkut konteks realitas sosial politik yang bersifat berperilaku dan dianggap tidak bisa dikuantitatifkan, dan cenderung diabaikan dan tidak dapat digambarkan secara penuh. Perspektif kualitatif dari kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan proses pemahaman terhadap masalah kebijakan sehingga dapat melahirkan gagasan / pemikiran mengenai cara-cara pemecahannya. Masalah kebijakan pendidikan sendiri bersifat kualitatif sehingga proses pemahaman tersebut juga penuh dengan pemikiran yang bersifat kualitatif. Pemahaman terhadap masalah kebijakan pendidikan dilahirkan dari cara berpikir deduktif, cara berpikir yang dimulai dari wawasan teoritis yang dijabarkan menjadi satuan konsep yang lebih operasional dan dapat dihubungkan dengan kenyataan. Wawasan teoritis sendiri tidak berdiri sendiri karena sangat tergantung pada subjektivitas seorang analisis dalam mempersepektifkan kebijakan pendidikan.

Perbedaan wawasan tidak semata disebabkan oleh sifat dan jenis masalah kebijakan, namun cenderung diakibatkan oleh cara pandang berlainan atau perbedaan paradigma pemikiran atau filsafat pemikiran yang berlainan.

### **C. Pelayanan Publik Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara**

Peran pendidikan dalam pembangunan nasional memunculkan dua paradigma yang menjadi bagian pengambilan dari kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yaitu paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat pada keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat yang tidak mempunyai penduduk yang berpengetahuan dan kemampuan sikap yang modern. Lembaga pendidikan formal system persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian yang diperlukan dalam proses pembangunan *human investmen*. Di dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan ekspresi dari realitas masyarakat (bangsa) Indonesia yang memerlukan kesejahteraan. Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada rakyatnya tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Indonesia merupakan negara yang demokratis yang mana hak-hak dari warga negara tidak dapat diabaikan apabila hak warga negara terabaikan maka hal nya dengan melanggar hak konstitusional rakyat. Misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. (Hesti, 2011)

Pemenuhan pelayanan publik sektor pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diantaranya sebagai berikut :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti;
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;

6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya;
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

#### **D. Gerakan Ayo Sekolah**

Pada masa sekarang ini, pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan. Masyarakat mulai berlomba untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Pemerintah pusat maupun daerah kini juga banyak yang melakukan gebrakan dengan mengadakan program kerja nyata.

Untuk menekan angka putus sekolah pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar. Dimana disebutkan bahwa sekolah wajib hingga tingkat SMP/MTs Sederajat atau 9 tahun. Untuk mewujudkan peraturan pemerintah tersebut Pemkab Bojonegoro membuat suatu program yaitu program “Ayo Sekolah”. Program ini dibuat karena adanya

bentuk keprihatinan pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap anak-anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah, banyak pula diantaranya yang sudah sekolah tapi ujung-ujungnya pendidikan tersebut putus di tengah jalan. Dari beberapa faktor yang melandasi masalah-masalah tersebut, salah satu faktor pokok yang menyebabkan masalah itu adalah faktor ekonomi.

Gerakan Ayo Sekolah adalah program untuk mengajak masyarakat agar menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (<https://beritabojonegoro.com>). Gerakan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat Bojonegoro. Salin itu juga untuk mengurangi usia perkawinan dini maupun rendahnya minat/motivasi orang tua dalam melanjutkan sekolah anaknya.

Meskipun pemerintah pusat sudah memberikan bantuan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi hal itu masih belum mampu menyentuh program wajib belajar 12 tahun. Gerakan “Ayo Sekolah” ini bukan hanya sekedar program, tetapi juga program kerja nyata yang ditempuh oleh Pemkab Bojonegoro dengan memberikan bantuan berupa dana kepada anak-anak usia sekolah. Khususnya adalah anak-anak usia 7-18 tahun.

Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan adalah bentuk apresiasi kepada anak-anak di Bojonegoro yang masih ingin melanjutkan ke jenjang sekolah tapi terbentur ekonomi. Disamping itu Bupati memerintahkan kepada Para Kepala Desa untuk memberikan bantuan berupa seragam, sepatu dan peralatan sekolah kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang sama untuk turut serta membantu anak-anak ini kembali

bersekolah. Gerakan Ayo Sekolah adalah untuk mendukung kebijakan dari pelaksanaan program wajib belajar minimal untuk tingkat pendidikan dasar menengah dan motivasi masyarakat untuk meneruskan pendidikan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi.

Hal ini dilakukan agar anak-anak yang tidak sekolah mampu bersekolah, dan anak-anak yang tengah menempuh jenjang pendidikan tidak sampai putus sekolah. Selanjutnya adalah meningkatkan relevansi kualitas pendidikan baik yang berupa *out put* dan *out come*. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembinaan, pendampingan, dan penguatan terhadap sekolah-sekolah yang belum terakreditasi yaitu melalui sarana dan prasarana dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik di Bojonegoro.

Gerakan Ayo Sekolah juga merupakan salah satu kebijakan dari pemerintahan Kabupaten Sambas. Gerakan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia masyarakat Kabupaten Sambas. Selain itu juga untuk mengurangi usia perkawinan dini maupun rendahnya minat/motivasi orang tua dalam melanjutkan sekolah anaknya dan sebagai upaya mengurangi angka putus sekolah siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.

Sebagai gambaran bahwa banyaknya siswa yang tidak melanjutkan pada jenjang tamatan SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK pada tahun pelajaran 2012/2013, maka Dinas Pendidikan membentuk Tim Gerakan Ayo Sekolah. Jumlah peserta didik pada jenjang SD yang mengikuti Ujian Nasional tahun 2012/2013 sebanyak 10.169 orang, namun yang melanjutkan ke jenjang

pendidikan SMP/Mts sebanyak 9.743 orang ( 95, 81%). Dengan demikian masih ada 426 orang yang tidak melanjutkan ( 4,19% ). Sedangkan untuk tahun pelajaran 2013/2014 jumlah peserta yang mengikuti ujian sebanyak 10.667 orang, yang melanjutkan ke SMP/MTs sebanyak 9.746 orang ( 91,37 % ). Masih terdapat sebanyak 921 orang yang tidak melanjutkan ( 8,63 % ).

Sedangkan jumlah peserta didik pada jenjang SMP yang mengikuti ujian 2012/2013 sebanyak 6.951 orang, namun yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/SMK dan MA sebanyak 6.427 orang (92,46%). Dengan demikian masih 524 orang peserta didik yang tidak melanjutkan (7,54 %). Sedangkan untuk tahun pelajaran 2013/2014 yang mengikuti ujian sebanyak 7.020 orang, yang melanjutkan sebanyak 5.613 orang (79,96%) dan yang tidak melanjutkan sebanyak 1.407 orang ( 20,04 % )

Gerakan Ayo Sekolah juga diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Gerakan Ayo Sekolah ini melibatkan seluruh komponen pendidikan baik itu penilik sekolah, pengawas sekolah dan Kepala UPT dengan harapan untuk mengajak masyarakat Kabupaten Sambas dalam setiap tahun pelajaran dimulai agar selalu memotivasi anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tujuan dari program gerakan ayo sekolah Kabupaten sambas pun tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Bojonegoro di antara nya adalah :

1. Memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Sambas dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sambas

3. Memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Sambas yang tergolong tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan
4. Memberikan motivasi kepada masyarakat Kabupaten Sambas untuk dapat melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi
5. Menghindari peserta didik untuk kawin atau kerja pada usia dini
6. Mengurangi jumlah siswa yang tidak melanjutkan pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA ataupun SMK
7. Untuk mendata anak pada usia sekolah yang terlanjur putus sekolah pada jenjang pendidikan formal untuk didorong mengikuti pendidikan luar sekolah ( Paket A, B dan Paket C )

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas dalam rangka peningkatan IPM dengan batas jangka waktu 5 tahun. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun secara nasional sudah tuntas sejak tahun 2008 dengan ditandai pencapaian indikator APK SMP/MTs sebesar 96,18 %. Sedangkan APK SMP/MTs Kabupaten Sambas baru 97,08 % (tahun 2012). Adapun target yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas melalui program Gerakan Ayo Sekolah adalah :

1. Pada tahun 2018 tamatan siswa SD yang melanjutkan sebesar 98 % dari jumlah lulusan (meningkat 2,19 %)
2. Pada tahun 2018 tamatan siswa SMP yang melanjutkan sebesar 95 % dari jumlah lulusan ( meningkat 2,54 %)

Sedangkan mengenai anggaran dari gerakan ayo sekolah Kabupaten sambas memiliki perbedaan dengan Kabupaten Bojonegoro. Selain



mengembangkan program pendanaan kompetitif, upaya lainnya yang terkait dengan akselerasi pencapaian target IPM, dalam tahun 2015 akan memasukan kegiatan Gerakan Ayo Sekolah berupa bantuan biaya operasional yang dimasukan dalam Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan target hasil terlaksananya Gerakan Ayo Sekolah dalam peningkatan IPM Kabupaten Sambas. Anggaran yang tersedia dalam program Gerakan Ayo Sekolah tersebut sebesar Rp 336.000.000,00.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2014 juga dimasukan dalam Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan target hasil mengurangi angka putus sekolah sehingga meningkatkan IPM Kabupaten Sambas. Selain itu terbantunya siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun anggaran yang tersedia untuk 2014 adalah sebesar Rp 264.228.000,00. Dengan anggaran sebesar itu semoga dapat terbantunya siswa yang rawan putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena dari anggaran tersebut disediakan bantuan berupa pakaian seragam sekolah untuk siswa SMP dan SMA/SMK.

Pakaian seragam sekolah dan alat tulis sekolah diberikan kepada siswa yang rawan putus sekolah tersebut bekerja sama dengan pihak UPT Dinas Pendidikan untuk mencari data-data tersebut pada setiap sekolah yang ada pada wilayah binaannya. Untuk jumlah kuota penerima bantuan pada setiap jenjang adalah sebagai berikut :

1. Jenjang Pendidikan/Jumlah Kuota 2013 :

- SMP : 180

- SMA :160

- SMK : 100

Jumlah pada tahun 2013 adalah 440

2. Jenjang Pendidika/Jumlah Kuota 2014 :

- SMP : 115

- SMA :160

- SMK : 80

Jumlah pada tahun 2014 adalah 355

**E. Dana Alokasi Khusus**

1. Pengertian DAK

Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Dasar memiliki arti dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang menjadi prioritas nasional tahun 2015 yang merupakan urusan Daerah.

2. Maksud Pemberian DAK

Sesuai dengan pengertian Dana Alokasi Khusus Pendidikan, maka pemberian DAK oleh pemerintah dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang menjadi urusan wajib daerah dan merupakan prioritas

nasional dengan tujuan pemenuhan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai standar nasional pendidikan. Tentu saja atas pelaksanaan DAK bidang pendidikan khususnya Pendidikan Dasar ada target yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan, target tersebut adalah tersedianya sarana dan/atau prasarana pendidikan yang memenuhi standar prasarana dan sarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Dalam memenuhi maksud dan target tersebut terdapat prinsip dalam pengelolaan DAK, prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- 2) efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- 3) transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan;
- 4) akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- 5) kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- 6) manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka

pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

#### **F. Putus sekolah**

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai (Musfiquon, 2007: 19). Anak merupakan generasi penerus bagi kelangsungan hidup keluarga, bangsa dan negara di masa mendatang. Oleh karena itu memberikan jaminan bagi generasi penerus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik merupakan investasi sosial masa depan yang tidak murah dan harus dipikul oleh keluarga, masyarakat dan negara.

Pendidikan untuk semua tidak hanya berkisar pada perhitungan APM (Angka Partisipasi Murni) dan APK (Angka Partisipasi Kasar) semata, namun terlebih harus menitik pada pemastian kualitas pendidikan itu sendiri terhadap peserta didiknya. Banyak kalangan menilai sistem pendidikan di Indonesia belum dapat membekali anak dengan kompetensi dasar yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengupayakan kehidupan yang lebih baik di masa depan (Ali, 2009: 17).

Asumsi ini jika dijelaskan bahwa pendidikan harus mengembangkan anak didik agar mampu menolong dirinya sendiri, artinya memberi pertolongan agar anak mampu menolong dirinya sendiri di masa depan. "Banyaknya

lulusan pendidikan formal mulai dari SLTP sampai lulusan perguruan tinggi yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan telah membawa dampak buruk pada persepsi masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan bagi anak. Artinya pandangan tersebut akan berakhir dengan asumsi buat apa sekolah setinggi-tingginya jika akhirnya tidak memiliki pekerjaan. Asumsi ini telah mengaburkan pengertian tentang arti pendidikan sepanjang hayat. Namun dibalik itu asumsi tersebut telah mengkritisi pendidikan selama ini bahwa pendidikan kita tidak menyiapkan lulusan yang berorientasi pada masa depan. Artinya sekolah yang semestinya menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan justru kehilangan arah dan tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan manusia yang mampu menghadapi tantangan dimasa depan” (Gunawan, 2000: 86).

Penggantian kurikulum hanyalah bersifat tambal sulam. Watak masa depan memang sering diungkapkan, tetapi tidak diantisipasi secara memadai dalam kurikulum. Seharusnya melalui pendidikan kita harus mampu menciptakan manusia yang mampu menolong dirinya sendiri di masa yang akan datang. Seperti yang dikemukakan oleh Ivan Illich, seorang pakar filsafat pendidikan. Dalam konsepnya Ivan Illich menggambarkan tentang adanya masyarakat khususnya anak usia sekolah yang ingin bebas dari ikatan-ikatan pendidikan sekolah.

Menuru Ali (2009: 137) mengemukakan bahwa kelemahan dari sistem pendidikan saat ini adalah sekolah lebih menitikberatkan produknya pada lulusan yang hanya didasarkan atas hasil penilaian dengan angka-angka dan

ijasah. Sekolah telah mengaburkan makna belajar dan mengajar, dan kemampuan lulusan untuk berprestasi dan berinovasi. Proses pendidikan didominasi oleh guru yang pada gilirannya merampas harga diri peserta didik, yang mengakibatkan kurang kreatif dan rasa ketidak-bebasan untuk mengembangkan kemampuan diri dan potensi yang ada. Guru sering memainkan perannya dalam empat macam kekuasaan, yaitu sebagai hakim, penganjur ideologi, dokter dan peramal rahasia kehidupan peserta didik di masa depan. Hal ini mengakibatkan tumbuhnya sikap ketergantungan peserta didik kepada pihak lain yang lebih berkuasa. Pendidikan sebagai pranata sosial yang ada, memiliki hubungan yang mantap dan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan mempunyai peranan yang mendasar untuk memanusiakan manusia.

Pendidikan bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada individu/ kelompok guna memahami dan mengontrol kekuatan sosial ekonomi dan politik sehingga dapat memperbaiki kehidupannya di dalam masyarakat. Program belajar di desain untuk memberi kesempatan pada masyarakat guna menganalisis kehidupan mereka dan untuk mengembangkan keterampilan yang mereka kehendaki dalam merubah keadaan ekonominya (Elfindri, 2008:68).

Menurut Ali (2009: 38) mengajukan solusi masalah dengan "*humanisasi*" yaitu menempatkan insan pembangunan sebagai pelaku dan bukan sebagai penderita pembangunan. Pendidikan sekolah bukan sebagai satu-satunya penyebab timbulnya anak putus sekolah. Dampak yang

ditimbulkan oleh pendidikan sekolah terhadap masyarakat luas, dan melihat pola interaksi antara dua kelompok yang ada di masyarakat, yaitu: 1) kelompok yang cenderung untuk membebani masyarakat atau kelompok penekan. 2) kelompok yang merasa dikuasai atau dibebani, atau kelompok yang merasa tertekan.

Sepanjang adanya dua kelompok ini, tidak mungkin mereka dapat berkembang secara demokratis, kreatif dan dinamis. Pandangan Freire terhadap pendidikan sekolah adalah: pertama, adanya ketidak berhasilan sekolah untuk mengembangkan situasi belajar-mengajar yang memberi kemampuan kepada peserta didik untuk berpikir kritis sehingga mereka dapat mengenali menganalisis dan memecahkan yang timbul dalam kehidupan di masyarakat.

Kedua, situasi belajar-mengajar di sekolah pada umumnya tidak mengembangkan dialog antara pendidik dan peserta didik untuk saling belajar, dan sekolah lebih menekankan hubungan vertikal antara guru dan murid.

Kegiatan belajar-mengajar sekolah lebih didominasi oleh guru yang cenderung berperan sebagai penekan sedangkan peserta didik berada dalam situasi tertekan. Gaya mengajar yang ada di sekolah tajam dan identik dengan sistem transaksi bank (*banking sytem*) yang memindahkan informasi dari pikiran guru dengan mendepositokan kepada peserta didik. Oleh karena itu guru hendaknya berperan sebagai fasilitator untuk membantu para peserta didik agar mereka belajar dengan cara berfikir dan bertindak. Sumbangan pikiran yang paling utama adalah pendidikan sebagai konsep penyadaran untuk

membangkitkan kesadaran diri peserta didik terhadap lingkungannya. Kesadaran ini ditumbuhkan melalui gerakan pendidikan pembebasan.

#### **G. Sebab-Sebab Anak Putus Sekolah**

Putus sekolah bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan. Faktor ekonomi menjadi alasan penting terjadinya putus sekolah. Persoalan ini telah berakar dan sulit untuk di pecahkan, sebab ketika membicarakan solusi maka tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Ketika membicarakan peningkatan ekonomi keluarga terkait bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Sementara semua solusi yang diinginkan tidak akan lepas dari kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh, sehingga kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengatasi segala permasalahan termasuk perbaikan kondisi masyarakat (Gunawan A. H, 2000: 27).

Kebijakan pemerintah tentang Program wajib belajar 9 tahun didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses terhadap pendidikan yang sama untuk semua anak. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang perlu



dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat.

Pemerintah telah berusaha menanggulangi masalah putus sekolah dengan memberikan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan program ini untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Meskipun usaha telah dilakukan pemerintah namun kasus anak putus sekolah tetap masih ada.

Berbagai penelitian menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah, yaitu: status ekonomi, jenis pendidikan siswa (umum atau kejuruan), kehamilan, kemiskinan, ketidaknyamanan, kenakalan siswa, penyakit, minat, tradisi/adat istiadat, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, usia orang tua, jumlah tanggungan keluarga, kondisi tempat tinggal serta perhatian orang tua (Musfiqon, 2007: 24).

Berdasarkan konsep tersebut dapatlah dikemukakan bahwa program pendidikan hendaknya dirancang dan diarahkan untuk membantu masyarakat agar memiliki kebebasan yang bertanggungjawab dalam upaya memajukan diri masyarakat dan lingkungannya. Artinya strategi kegiatan belajar merupakan suatu proses untuk memanusiakan manusia. Proses inilah yang disebut pendidikan sebagai panggilan sejarah untuk tujuan kemanusiaan.

Lain lagi yang diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara (Sudjana, 2005: 64) bahwa pendidikan dimaksudkan untuk menuntun segala kekuatan kodrat

yang ada pada peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam pendidikan, tidak memakai istilah paksaan, serta selalu menjaga kelangsungan hidup batin anak dan mengamati agar anak dapat tumbuh dan berkembang menurut kodratnya.

Pendidikan secara umum berarti usaha menumbuh-kembangkan budi pekerti, intelegensi dan tubuh peserta didik, oleh sebab itu maka segala sarana, usaha dan metoda pendidikan harus sesuai dengan kodrat manusia. Kodrat keadaan manusia itu meliputi adat istiadat peserta didik, adat istiadat sebagai sifat perikehidupan, atau perpaduan usaha dan daya upaya menuju hidup tertib dan damai akan dipengaruhi oleh masa.

Pengajaran bertujuan untuk kemerdekaan hidup manusia secara lahiriah, sedangkan pendidikan bertujuan untuk kemerdekaan hidup manusia secara batiniah. Manusia baik secara lahiriah maupun batiniah, tidak tergantung kepada orang lain, melainkan bersandar atas kekuatan sendiri. Tujuan pengajaran dan pendidikan yang berguna bagi kepentingan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam pendidikan, kemerdekaan itu maksudnya adalah berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain (Sujana, N. 2005: 65).

Lebih lanjut Ki Hajar Dewantara (Sudjana, 2005: 67) mengemukakan bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam proses pendidikan adalah menumbuh kembangkan potensi peserta didik untuk dapat berkreaitivitas karena kreativitas

merupakan lambang suatu masyarakat yang mampu mengungkapkan diri secara bebas, kritis terhadap lingkungannya, serta mampu berfikir dan bertindak di dalam dan terhadap dunia kehidupannya.

Berdasarkan teori-teori tersebut diatas dapatlah disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab anak putus Sekolah Dasar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: faktor ekonomi, geografi, besarnya jumlah saudara, tidak ada penerangan listrik, rendahnya pendidikan orang tua, dan faktor sosial budaya.

#### **H. Permendagri No 14 tahun 2016**

Dalam setiap keputusan kepala daerah harus berlandaskan pada undang-undang maupun peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan program gerakan ayo sekolah di Kabupaten Bojonegoro, pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengacu pada Permendagri no 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Permendagri No 14 tahun 2016 ini berisi Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Adapun Permendagri No 14 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

##### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Pertama

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah Kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

18. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### **BAB III HIBAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 4**

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
  - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;



- b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi:

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:

- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Kedua

### Penganggaran

### Pasal 8

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi

kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.

(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

## BAB IV

### BANTUAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
  - (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
10. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:
  - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan

Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

(2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Menteri ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian

berdasarkan Peraturan Menteri ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

